

BELUM DIKOREKSI

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN KEJAKSAAN AGUNG RI**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi III DPR RI
Hari/tanggal : Senin, 6 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.45 s.d.13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara : Pembahasan APBN-P Tahun 2016 Kejaksaan Agung RI

KETUA RAPAT (DR. BENNY K HARMAN, SH/F-PD):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Selamat pagi, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang kami muliakan.**

Sebelum kita mulai dari meja Pimpinan, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab hanya atas berkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung pada siang ini, pagi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Apalagi ini hari pertama kita berpuasa. Atas nama Pimpinan, tentu kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan ini. Semoga membawa banyak berkah bagi kita semua.

Sesuai dengan catatan yang ada di meja Pimpinan. Rapat pag ini sudah dihadiri oleh 17 dari 53 Anggota dan 6 Fraksi dari 10 Fraksi yang ada di Komisi III. Oleh sebab itu sesuai dengan peraturan Tata Tertib rapat ini belum memenuhi kuorum dari segi jumlah anggotanya tetapi dari segi jumlah fraksi sudah memenuhi kuorum. Sebab ada 6 dari 10 fraksi. Oleh sebab itu saya mohon persetujuan, apakah kita skors dulu menunggu banyak anggota lagi, menunggu anggota yang datang atau kita lanjutkan sebab ada 6 Fraksi dari 10.

Bagaimana kita lanjutkan?

Baik.

Kita putuskan untuk kita lanjutkan. Dan atas seijin Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung dan seluruh jajarannya atas kesediaan memenuhi undangan Komisi III pada rapat pagi ini. Demikian juga kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi III, kami mengucapkan terima kasih.

Agenda yang kami tawarkan dari meja Pimpinan untuk Rapat Kerja pagi ini adalah: yang pertama, Jaksa Agung akan menyampaikan rencana APBN Perubahan Tahun 2016, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan ketiga kita tutup dengan kesimpulan. Dan nanti kalau bisa paling lambat kita selesai pukul 12.00-lah karena ini kan puasa. Setelah itu kita istirahat, lanjutkan dengan mitra kerja kita yang lain. Supaya nanti sebelum pukul 17.00 seluruhnya sudah selesai supaya teman-teman tidak buka puasa di jalan.

Setuju begitu ya?

Jadi kita jam 12.00 selesai dengan Jaksa Agung.

Tiga agenda tadi setuju ya dan kita nanti akhiri pukul 12.00.

Setuju Pak Jaksa Agung?

Pak Taufiq?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Demikian pengantar kami dari meja Pimpinan.

Jadi sekali lagi acara kita pada pagi ini adalah mendengarkan penjelasan Jaksa Agung mengenai APBN Perubahan khususnya untuk Kejaksaan. Seperti apa nanti policy Kejaksaan Agung, kita dengar dan kita putuskan. Kita setuju atau tidak setuju untuk kemudian nanti kita bahas dalam, kita bawa dalam Rapat Pleno Komisi III untuk mendapatkan persetujuan final.

Jadi untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

***Bismillahirrohmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Selamat siang,
Salam sejahtera dan
Oom Swastiastu,**

**Yang saya hormati dan saya muliakan Pimpinan Rapat Kerja Bapak DR. Benny Karman,
Segenap Anggota Komisi III yang juga tidak kalah saya muliakan juga, serta
Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.**

Pertama-tama juga kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa pada hari ini kita masih diberkenan untuk bertemu melaksanakan salah satu tugas kita untuk menyelenggarakan Rapat Kerja antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR RI.

Berikutnya artinya juga mengawali karena masih bulan puasa Ramadhan kami atas nama pribadi dan selaku Pimpinan, jajaran Kejaksaan mengucapkan selamat berpuasa bagi semua pihak khususnya para Anggota Dewan Komisi III yang terhormat. Semoga puasa kita kali ini mampu mengantarkan kita menjadi insan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya pada saat yang sama hari ini, jam yang sama kami ada undangan kegiatan di istana tapi saya lebih memilih untuk hadir di tempat ini sebagai wujud dan bentuk penghormatan yang tinggi kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati,

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pimpinan Rapat Kerja ini tadi bahwa agenda utama yang akan kita bicarakan nanti adalah berkenaan dengan masalah pembahasan APBN Perubahan Tahun 2016 dan membahas masalah yang lain yang nanti mungkin kita anggap perlu.

Sebagai pengantar berkenaan dengan masalah anggaran Kejaksaan Indonesia dapat kami sampaikan bahwa anggaran Kejaksaan khusus yang berkaitan dengan biaya penanganan perkara, baik untuk perkara pidana umum, pidana khusus maupun perdata dan data urusan negara sangat jauh dari mencukupi. Disamping juga keterbatasan biaya yang tersedia guna menutupi dan menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan kebutuhan kantor berupa antara lain biaya langganan listrik PLN, telepon, air, internet dan lain sebagainya juga pemeliharaan gedung kantor, biaya mutase pegawai, dan juga keperluan pokok perkantoran, antara lain katakanlah berkaitan dan biaya pemeliharaan kendaraan tahanan yang masing-masing kejaksaan negeri rata-rata memiliki 3 unit kendaraan tapi yang tersedia anggaran pemeliharannya hanya untuk 1 unit saja.

Kami didalam DIPA untuk anggaran 2016 Kejaksaan tercatat mendapatkan biaya sebesar Rp4.527.592.621.000,- Namun sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga, anggaran Kejaksaan. Anggaran Kejaksaan yang sudah kami nilai sangat terbatas itu masih harus mengalami pemotongan sebesar Rp162.766.788.600,-.

Berkenaan dengan kebijakan pembentukan tadi Jambin telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara untuk

menentukan sector-sektor mata anggaran mana yang bisa dikurangi dan sector-sektor mata anggaran mana yang justru harus ditambah atau setidaknya dipertahankan jumlahnya.

Berkenaan dengan masalah penyusunan dan pengelolaan anggaran ini Kejaksaan memiliki 5 satuan kerja di Kejaksaan Agung yaitu di pembinaan, intelegen, ... khusus, pengawasan dan Datun yang masing-masing memiliki kuasa pengguna anggaran yaitu para ... sendiri. Dan untuk seluruh Indonesia di Kejati dan Kejari memiliki kurang lebih 560-an satuan kerja. Dan otoritas yang lebih mengetahui secara detail mengenai anggaran Kejaksaan Indonesia ini adalah Saudara Jaksa Agung pengguna pembinaan karena Jambin-lah yang ikut menyusun perencanaan anggaran, mengikuti perkembangan pembahasan penyusunan anggaran dari awal sampai akhir, baik itu saat pembahasan di tingkat multilateral meeting maupun di trilateral meeting bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Nasional Bapenas. Maka dalam kesempatan ini nantinya kami mohon kepada Pimpinan ijin dari segenap Anggota Dewan Komisi III untuk memberikan kesempatan kepada Jambin nanti untuk bisa memberikan penjelasan dan gambaran yang lebih komprehensif dan lengkap tentang anggaran Kejaksaan saat ini.

Sementara secara singkat masalah lain-lain yang perlu kami sampaikan disini adalah pertama, berkaitan dengan masalah mutasi dan promosi Bapak/Ibu sekalian. Mutasi dan promosi di lingkungan Kejaksaan pada dasarnya dilatarbelakangi pada, terutama 3 pertimbangan pokok, pertama adalah mutase diselenggarakan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong, baik karena pejabat yang lama pensiun atau meninggal dunia. Kedua, karena promosi dan/atau demosi. Ini berkaitan dengan kebijakan reward dan *punishment*, dan ketiga karena kebutuhan organisasi. Dibalik itu semua mutasi terutama promosi selalu mengacu kepada kriteria persyaratan yang kami jadikan sebagai standar operasional prosedur yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas yang harus dipenuhi oleh seorang Jaksa dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya adalah bahwa disini baik prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritasnya harus dimiliki secara bersama-sama. Kami tidak hanya mementingkan seseorang pegawai atau Jaksa yang berprestasi saja tetapi integritasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pun orang yang hanya memiliki integritas tapi tidak punya prestasi. Ini semua menjadi pertimbangan kami.

Perlu kami informasikan bahwa dilingkungan kejaksaan ada 2 kelompok Jaksa yaitu Jaksa yang menduduki jabatan structural dan jaksa fungsional yang tidak menduduki jabatan structural. Jumlah Jaksa fungsional golongan IV/a sekarang ini berdasarkan informasi dari Jambin sekitar hampir 1500 orang. Bahkan bisa naik 1750 orang. Sementara jabatan structuralnya ada baik Kejari, khususnya Kejari sekitar 500-an formasi tergantung dari jumlah kabupaten/kota yang ada di negara kita ini. Sementara jabatan structural untuk Eselon III/a yang diduduki oleh asisten di Kejaksaan Tinggi, Kabag di Kejaksaan Agung, Kasubdit dan Inspektur Muda Kejaksaan Agung jumlahnya juga sangat terbatas dan semuanya sudah terisi. Sehingga untuk promosi untuk Eselon III/b yaitu katakanlah coordinator di Kejari type B ke Eselon III/a yaitu Kejari type Ayat dan Asisten Kejati harus menunggu giliran, antri. Begitu pun saya katakan tadi para coordinator, Kejaksaan Agung serta yang sekarang ini dalam Eselonisasinya adalah Eselon III/b untuk menjadi Kajari.

Keputusan tentang promosi dan mutasi selalu dilakukan dalam Rapat Pimpinan. ... Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, dan para Jaksa Agung muda. Kami

menyadari bahwa diantara mereka mendapatkan giliran untuk mutasi dan promosi tentunya ada juga yang merasa kurang puas karena belum mendapatkan giliran yang sama dari teman-teman yang sudah mendapatkan duluan promosi. Dan disinilah tentunya kami berharap kepada para Jaksa khususnya yang fungsional atau yang menduduki Eselon IV untuk Eselon III mereka hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh penggunaan persyaratan, prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas ini. Disamping ... tidak kalah pentingnya adalah setiap kita tentunya menghadapi seleksi alamiah. Dimana ketika seseorang dinyatakan baik, dikenal baik itu akan disampaikan oleh yang lain karena setiap orang jadi contoh kita, begitu pun sebaliknya.

Saya rasa masalah seperti ini juga dialami oleh instansi dan institusi lain, lembaga lain terutama TNI dan Polri. Karena kalau boleh kami sampaikan bahwa dari sekian ratus tamatan Akmil maupun Akpol setiap tahunnya tentunya tidak semuanya akan menjadi Jenderal. Itu yang terkait dengan masalah prestasi, dedikasi dan loyalitas, integritas serta seleksi alamiah tadi.

Kemudian kembali mengenai masalah keterbatasan anggaran, perlu kami sampaikan bahwa keterbatasan anggaran ini dirasakan baik di pusat maupun di daerah. Untuk di Kejaksaan Agung sendiri pun diseluruh bidang ... sama baik bidang pembinaan, intelijen, ... umum dan khusus, perdata, ... dan pengawasan. Anggaran yang terbatas dan kurang bahkan tidak tersiar tersebut harus disiasati dengan baik oleh para Pimpinan Kejaksaan di pusat maupun daerah. Yang menyolok yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah keterbatasan bahkan ketiadaan tersebut antara lain meliputi atau mengenai, biaya untuk mendukung kinerja dibentuknya Satgasus P3TPK (Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi). Selama ini Satgasus yang dibentuk meskipun dan prestasi yang cukup membanggakan tetapi sama sekali tidak didukung dan biaya tambahan. Begitu pun dengan dibentuknya tim pengawal dan pengaman pemerintahan pembangunan yang kami singkat dengan TP4P dan D yang berkedudukan di pusat maupun di daerah juga sama sekali tidak didukung oleh anggaran tambahan. Sementara kita semua tahu bahwa didirikannya TP4 adalah justru untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan pembangunan di semua sector dan lini. Dan TP4 yang kami bentuk ternyata mendapatkan apresiasi dari semua pihak kalangan, khususnya para pejabat daerah. Dan sekarang ini Bapak Pimpinan, kami kewalahan dan kebanjiran untuk adanya permohonan dari banyak pihak baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintahan Daerah untuk kejaksaan bisa melakukan pendampingan ketika mereka melaksanakan program pembangunan ... masing-masing.

Bahwa TP4 yang kami bentuk sebagaimana kami laporkan sebelumnya adalah dititikberatkan pada upaya pencegahan preventif dan bukan semata-mata penindakan. Sekali lagi saya sampaikan didirikannya TP4 ini mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang cukup positif dan cukup banyak dari teman-teman kita jajaran eksekutif yang lain. Kami juga melaksanakan program "Jaksa Masuk Sekolah" kaitannya dengan penjabaran dari seruan Pemerintah sekarang untuk melaksanakan revolusi mental. Dimana para Jaksa di seluruh lini, tingkatan baik di Kejaksaan Agung, Kejati dan Kejari mereka masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang ... upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan itu dilakukan kepada mereka sejak di usia dini. Kami juga perlu melaporkan bahwa Kejaksaan sudah mengawali untuk melakukan langkah-langkah upaya pendalaman, dan pemahaman terhadap revolusi mental dikalangan pejabat kejaksaan dan kami sudah laksanakan baik

untuk pejabat kejaksaan Eselon II di Kejaksaan Agung maupun para Kajati di seluruh Indonesia, para Kajari dan para Asisten. Diharapkan dengan upaya pendalaman dan pemahaman terhadap ... ini akan memberikan dampak positif bagi para pejabat Kejaksaan dimasa yang akan datang.

Satu hal lagi yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa bahkan untuk tugas-tugas dalam kaitan dan ... pun (penegakan hukum terpadu) dimana Jaksa menjadi salah satu elemen dan unsur didalamnya ketika dilaksanakan baik Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Sama sekali Kejaksaan tidak mendapatkan dukungan biaya. Berbeda dan ... lain katakana kepolisian, Bawaslu dan KPU. Jadi hanya Kejaksaan yang sama sekali nihil tidak mendapatkan biaya sama sekali.

Namun demikian dengan niat dan semangat untuk kita mendedikasikan apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini tentunya kami tetap laksanakan tanpa harus menyampaikan keluhan yang berlebihan. Tapi saya rasa pada kesempatan ini perlu kami sampaikan. Sementara untuk hal yang sangat prinsip dan strategis ... pun kejaksaan tidak disiapkan dana pendukung.

Kemudian berkaitan dan masalah kinerja Datun. Saya juga ingin sampaikan disini bahwa permintaan MoU dari banyak pihak Kementerian/Lembaga dan juga BUMN itu demikian pesat dan deras kepada kami sementara surat kuasa khusus yang disampaikan baik oleh Presiden, para Menteri dan juga BUMN dan lain-lain itu semakin banyak sementara mohon dipahami bahwa untuk ini semua pun kami tidak pernah memungut biaya non fee Bapak/Ibu sekalian.

Nah kesulitan ... katakanlah contoh konkritnya adalah ketika masyarakat sangat mengharapkan segera dilaksanakannya putusan yang berkaitan dan keputusan kasasi ... PK Mahkamah Agung berkenaan dengan yayasan super semar. Ini pun terkendala karena tidak ada biaya. Jadi sebagai pihak-pihak yang berperkara mewakili pemerintah dan negara tentunya mendapatkan perlakuan sama dari pengadilan bahwa ketika ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan pun, kami sebagai ... harus memenuhi dan membayarnya. Seperti katakana ... kami sempat ditagih dan diwajibkan membayar biaya yang jumlahnya cukup besar sehingga karena tidak ada anggaran tersedia kami sedang berusaha untuk menyurati Mensesneg supaya mendapatkan dukungan. Nah kalau ini misalnya anggaran itu disiapkan seawal tentunya tidak harus terbuang waktu menyelesaikan kasus-kasus seperti ini.

Kira-kira itu Bapak-bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, juga ini sebelum lupa saya juga ingin sampaikan tentang kebijakan Pemerintah tentang moratorium pembangunan gedung kantor. Ini juga masalah bagi kejaksaan karena sejalan dengan pemekaran daerah di beberapa Provinsi dan bahkan juga bahkan juga pemekaran Provinsi sendiri kami mengalami permasalahan dibidang penyediaan kantor bagi kejaksaan-kejaksaan negeri dan Kejati yang baru didirikan, seperti katakanlah untuk Sulawesi Barat sampai sekarang pun belum ada kantor Kejaksaan Tingginya. Begitu pun untuk Papua Barat juga belum ada. Disamping mungkin jumlahnya puluhan. Kejaksaan Negeri yang mestinya harus mengikuti daerah pemekaran juga perlu memiliki tempat berkantor.

Dengan demikian tentunya kami sangat berharap dukungan dari Komisi III DPR RI ini agar anggaran Kejaksaan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara dapat diupayakan dalam APBN Perubahan 2016 ini, baik untuk Bidum, Bidsus maupun Datun. Agar penanganan perkara akan berujung pada

peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan dapat dioptimalkan. Pembangunan kantor khususnya di daerah pemekaran juga kami harapkan dukungannya. Kiranya bisa secepatnya bisa ter-realisir. Supaya teman-teman yang ditugaskan didaerah-daerah ... itu segera bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Saya rasa Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan secara singkat. Dan sekali lagi mohon ijin kalau masih diperlukan nanti untuk Saudara Jaksa Pengguna Pembinaan bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anggaran ini bisa lebih lengkap, lebih jelas dan lebih komprehensif.

Terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

**Selamat siang,
Salam sejahtera, dan
Om shanti-shanti-shanti om.**

KETUA RAPAT:

Baik.
Silakan, ada tambahan tadi?
Silakan.

PEMERINTAH/JAKSA AGUNG:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Salam sejahtera,
Selamat pagi, dan
Oom swastiastu.**

Atas ijin Pak Jaksa Agung.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan,
Ibu/Bapak Anggota DPR yang terhormat,**

Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung beberapa hal terkait adanya beberapa kekurangan anggaran. Kalau kita secara singkat bahwa pertama anggaran kejaksaan adalah 4 Triliun tadi. Kemudian pada bulan Mei 2016 itu kita diminta untuk ada penghematan 162 Miliar, kemudian Alhamdulillah, puji Tuhan bulan Mei ada tambahan anggaran dari bagian anggaran bendahara umum negara itu sebanyak Rp628.891.826.000,- Dan ini tentu saja dengan diberikan tambahan anggaran dari anggaran BUN tapi juga ada penghematan sebanyak 162 Miliar tadi. Mohon ijin untuk dihalaman 6, itu sudah kita sampaikan ada table yaitu dari anggaran DIPA kita 4 Triliun. Kemudian ada penghematan 162 Miliar, kemudian ada alokasi dari BUN tadi yang sebanyak 628 Miliar itu nanti diperuntukkan untuk penambahan anggaran perkara Pidum Rp332.843.000.000,- kemudian untuk tambahan perkara Bidsus Rp296.048.000.000,-

Namun demikian ini kan nantinya juga dihemat oleh penghematan 162 tadi sehingga tentu saja ini juga nanti ada kekurangan dan bahkan ini realisasinya nanti nunggu sekitar akhir bulan Juni.

Kemudian untuk penambahan tambahan anggaran APBNP 2016, mohon ijin dihalaman 7. Itu pertama yang akan kami sampaikan nanti APBNP adalah pemulihan anggaran yang penghematan tadi, yang penghematan 162 Miliar tadi. Mohon ijin nanti untuk dikembalikan lagi didalam APBNP untuk menutup kekurangan.

Kemudian yang kedua, itu untuk pembiayaan rumah susun sewa di Kedoya, mohon ijin kami sampaikan bahwa kejaksaan mendapat bangunan rumah susun di Kedoya. Namun demikian pembangunannya yang dilakukan oleh Menteri PUPR itu hanya bersifat fisik. Mengenai untuk isi dan sebagainya itu belum ada didalam anggaran disitu sehingga kami mengajukan APBNP untuk pengisian rumah susun tersebut sehingga dapat bisa operasional. Kami sampaikan, mohon ijin Bapak Jaksa Agung. Di Kejaksaan Agung ada rumah jabatan. Namun demikian rumah jabatan yang ada di lebak bulus itu kebanyakan tidak bisa dihuni karena sudah dihuni oleh para senior kita sehingga rumah Rusunawa di Kedoya ini sangat penting bagi operasional penugasan pegawai dilingkungan Kejaksaan. Di rumah susun itu ada 2 unit, 2 apartemen yang masing-masing berjumlah 48 unit sehingga ada 96 unit yang tidak siap di isi, kecuali nanti mohon ijin APBNP ini bisa disetujui untuk mengisi itu. Jumlahnya kita perkirakan sekitar Rp32.579.872.000,- Ini antara lain untuk mengisi agar rumah susun itu bisa difungsikan.

Kemudian yang ketiga, yang kami mohon untuk bisa disetujui APBNP-nya adalah pengadaan peralatan kontra penginderaan dan persandian. Dan ini untuk fungsi inteligen yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa kita belum punya standar keamanan informasi, yang ada baru peralatan untuk informasi inteligen tadi. Meskipun sebenarnya peralatan itu juga mungkin banyak kekurangan. Namun demikian kami mohon untuk bisa masuk APBNP sebanyak Rp97.787.040.700,-

Kemudian yang ketiga, untuk biaya eksekusi dalam perkara yayasan beasiswa supersemar. Ini memang ininya adalah pengadilan. Namun demikian itu diperlukan beberapa biaya yang dihitung oleh Bapak Jamdatun itu sekitar Rp2.500.000.000,- Jadi nanti mohon ini bisa disetujui untuk bisa pengembalian keuangan negara sebanyak 4 Triliun.

Kemudian berikutnya mengenai kelima, penambahan anggaran pengawasan. Jadi bidang pengawasan itu mengajukam beberapa tambahan, antara lain untuk video conference, ... *blowing system*, kemudian database pengawasan, zona integritas, pemantauan dan sosialisasinya. Ini dibidang pengawasan ada permohonan penambahan Rp9.144.000.000,- Sehingga kesemuanya yang kami ajukan adalah sebesar Rp310.990.157.000,- Ini belum termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung untuk Satgasus dan TP4D dan TP4P. Kemudian juga belum untuk penambahan kantor-kantor Kejaksaan Negeri yang baru maupun Kejaksaan Negeri yang memang harus sudah direnovasi.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih dan *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*.

JAKSA AGUNG RI:

Demikian Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Kerja ini dan waktu kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat Kerja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak penyampaian Jaksa Agung tadi.

Demikian Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian penjelasan Jaksa Agung mengenai rencana penghematan. Tadi intinya Kejaksaan Agung setuju penghematan. Setuju penghematan tetapi penghematan itu diusulkan untuk digeser yang tadi diusulkan oleh Jaksa Agung tadi.

Kemudian yang terakhir tadi penambahan untuk APBN Perubahan 2016. Cuma angka-angka ini bukan soal, mungkin untuk Komisi III angka ini tidak penting tapi juga dalam banyak kasus penting juga Pak untuk diketahui. Jangan sampai kita setuju angka, kita tidak tahu angka itu asal usulnya apa? Sebab sudah banyak kasus nanti. Sudah banyak kasus selama ini Pak ... Kita setuju angka, tiba-tiba ada kasus di KPK ya kita dipanggil. Kenapa disetujui. Ini juga jadi soal Pak Jaksa Agung. Mungkin tadi disini saya baca, Kejaksaan Agung masih membutuhkan tambahan 310 sekian, halaman 9. Darimana asal usulnya ini kan, kan begitu Pak. Ini rapat terbuka kita supaya tahu. Tidak ada sensitive yang begini-begini Pak. Tolong Bapak/Ibu sekalian perhatikan ini. Jadi kalau kita setuju kita harus tahu itu. Sebelum kita tahu kita tidak boleh kasih persetujuan. Kan begitu Pak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang diinginkan kita sama-sama. Karena Pimpinan tidak ada yang mau pimpin rapat yang begini-begini ini. Karena takut dipanggil.

Jadi saya selanjutnya persilakan Bapak/Ibu Anggota Komisi lebih baik lagi kalau pakai fraksi penyampaiannya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalau yang tidak jelas tolong ditanya supaya dibikin jelas. Sebab nanti saya mohon maaf pernah juga di tanya oleh penegak hukum. Kenapa fraksi-fraksi itu tidak tanya, loh kok tanya saya. Tanyalah fraksi itu kenapa dia tidak nanya. Ada lagi sebaliknya ditanya, kenapa fraksi itu kok ngotot sekali ya. Tanya dia loh kenapa dia ngotot. Kok aku kok yang ditanya. Padahal saya hanya mimpin lalu lintas. Begitu Pak Taufiq. Jadi mohon maaf Pak Taufiq bukan maksud kita untuk mempersulit. Membikin jelas hal-hal yang gak jelas, kan begitu Pak.

Jadi saya persilakan supaya kita gampang, supaya ada panduannya kami persilakan Fraksi Nasdem lebih dahulu.

Kami persilakan.

F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan yang saya hormati,

Jaksa Agung dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya hormati,

Kami memang mengetahui karena di Banggar bahwa memang ada sejumlah pemotongan yang jadi yang harus dilakukan didalam APBN sekarang ini sehingga menjadi APBNP sedemikian rupa. Mungkin hanya ada 1 Kementerian yang tidak dipotong tetapi lain adalah Kementerian dan lembaga lain semuanya akan mengalami persoalan seperti ini. Kami memang didalam sejumlah perjalanan ke Kunker, kita bertemu dengan Kejaksaan Negeri dan sebagainya. Mereka mengeluh semuanya tentang anggaran yang tidak memadai.

Nah saya ingin tanyakan kepada Kejaksaan Jaksa Agung, apakah dengan alokasi yang demikian rupa walaupun telah dijelaskan tad itu apakah Pak Jaksa Agung cukup puas dengan kondisi yang seperti ini? Apakah ada hal yang mungkin harus kita diskusikan di Komisi III ini agar kemudian mungkin ada hal atau ruang-ruang tertentu yang bisa kita pikirkan kembali.

Demikian dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Hanura.
Selanjutnya Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR, S.Ag., M.Si):

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati,

Pertama kami dari Fraksi PKS menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan bagi yang beragama Islam dan selain yang beragama Islam tentu menghormati yang beragama Islam melaksanakan ibadah puasa.

Bapak Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung muda yang kami hormati,

Berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat Komisi III bahwa diantara mitra Komisi III yang telah menyerahkan rincian anggaran Tahun 2016 dan juga terkait juga dan perubahan ini ternyata memang Kejaksaan Agung belum sampai menyampaikan laporan yang detail soal belanja. Nah karenanya dalam kesempatan ini kami berharap agar laporan dari Kejaksaan Agung ini bisa disampaikan secara mendetail.

Yang kedua, dari apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung yang barusan kami dengar. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa Kejaksaan Agung melakukan apa yang dinamakan *self blocking*. Lebih kurang 162 Miliar. Sementara juga ingin mendapatkan anggaran lebih kurang 310 Miliar.

Pak Jaksa Agung yang saya hormati,

Tentu setelah saya atau kami membaca laporan yang disampaikan tadi, tentu kami ingin juga mendapatkan informasi soal tambahan sebanyak 310 Miliar tersebut. Itu yang pertama soal tambahan.

Yang kedua, barangkali kedepan kami menyarankan saat misalnya disampaikan soal pembiayaan rumah susun sewa atau Rusunawa di Kedoya. Alangkah baiknya jika juga ditampilkan semacam informasi soal Rusunawa ini. Apakah dalam bentuk gambar dan lain sebagainya sehingga kemudian kita mengetahui bahwa memang rumah susun sewa di Kedoya itulah yang kemudian memang dibutuhkan pengerjaan terkait dengan pembiayaan kegiatan yang telah disampaikan tadi itu. Alangkah baiknya Pak JA jika memang kedepan, jika memang ada upaya untuk mengusulkan pekerjaan terkait dengan hal-hal seperti ini ada semacam lampiran berupa gambarkah misalnya sehingga kemudian kami bisa memahami, bisa mengetahui sehingga kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Benny tadi, jangan sampai kemudian kita “tidak bertanya, tidak ngotot” dan lain sebagainya. Dan ini bukan bagian yang dari kita ingin ngototkan tapi barangkali dalam rangka untuk kita lebih mengetahui bahwa memang rumah susun sewa di Kedoya tersebut membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang memang seperti yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung.

Barangkali demikian, karena ini soal anggaran dan kita berharap teman-teman Komisi III yang duduk di anggaran bisa menindaklanjuti aspirasi atau katakanlah dari Kejaksaan Agung soal penambahan ini karena mereka sendiri sudah mampu melakukan apa yang disebut *self blocking*, lebih kurang 162 Miliar dan tambahan 310 Miliar ini memang kalau yang kami baca ya memang dibutuhkan di lapangan.

Barangkali demikian untuk sementara Ketua dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami persilakan PPP.

F-PPP (H.M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati,

Kami dari PPP, ini ada 2 pertanyaan mungkin yang akan kami sampaikan. Pertama, kami ingin minta penjelasan disini dihalaman 8. Disini ada usulan anggaran tambahan sekitar 97 sekian Miliar untuk counter penginderaan atau counter surplensi dan persandian and *creaption*. Mungkin ini bisa lebih didetailkan itu bagaimana Pak. Sehingga perlu dana tambahan anggaran sekitar 97 Miliar.

Yang kedua, dihalaman 9 juga kita melihat disini ada perlu tambahan anggaran sebesar 9 Miliar sekian. Ini untuk kegiatan berupa pengadaan kendaraan roda empat

untuk Eselon II untuk Jamwas dan lain-lain. Jadi kita ingin tahu ini urgensinya apa? Padahal didaerah kalau memang harus pengadaan kendaraan kalau kita lihat mobil-mobil tahanan didaerah itu sudah banyak yang tidak layak. Jadi apakah tidak lebih prioritas pengadaan mobil tahanan-tahanan didaerah ini atau lebih prioritas pengadaan untuk kendaraan roda empat Eselon II ini.

Mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari PPP tanya soal. Halaman berapa tadi? itu soal rumah susun atau apa yang ditanya PPP.

F-PPP (H.M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH):

Tadi masalah pengadaan persandian dan IT ini Ketua. Penginderaan. Jadi disini ada permintaan 97 Miliar sekian itu mau di detailkan, karena ini cukup besar. Hampir 30%-an yang diminta.

KETUA RAPAT:

Baik.

Tadi PKS tanya rumah susun. PPP tanya soal pengadaan IT ya? karena pertanyaan ini semua ada maknanya Pak, kan begitu.

Jadi kalau ... dipanggil, nanti saya jawab yang tanya Cuma PPP, kan begitu. Kenapa PPP yang tanya, ya sebagai Pimpinan saya tidak tahu. Tanya langsung ke PPP-nya. Maksudnya jangan sampai ada pesanan.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB. PKB tidak ada?

F-PKB (H. BAHRUDIN NASORI, SSI., MM):

Ada Pak Ketua belok kanan dong. Lihat kanan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tapi ini bukan Mahkamah Agung ini Pak. Ini masih Kejaksaan Agung. Silakan.

F-PKB (H. BAHRUDIN NASORI, SSI., MM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan teman-teman yang saya hormati,

Pak Jaksa Agung beserta jajarannya yang saya hormati,

Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Pada prinsipnya dari Fraksi PKB setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tentang penambahan anggaran di APBNP ini. Karena kalau kami lihat dari seluruh instansi penegak hukum, kejaksaan agung yang paling rendah anggarannya kalau dibandingkan dengan Mahkamah Agung apalagi, dengan kepolisian, dengan KPK. Saya kira Jaksa Agung yang paling rendah.

Itulah makanya saya tidak setuju kalau di Kejaksaan Agung ada penghematan-penghematan yang. Apalagi penghematan-penghematan ini ada di lakukan di soal operasional, misalnya biaya listrik, biaya kantor, ini yang saya lihat. Apalagi kalau lihat dari sisa anggaran 2015. Kan ini ada berapa Miliar. Ini barangkali juga bisa dialihkan untuk supaya menutupi kebutuhan apa yang diusulkan oleh kejaksaan agung. Apalagi untuk biaya. Kalau kita keliling. Kemarin pada waktu kunjungan kerja di setiap Kejaksaan Negeri apa yang kita datangkan, itu memang selalu bawa jatah di Kejaksaan Negeri hanya 2 kasus untuk pidana umum dan pidana khusus. Itu memang sangat kurang.

Untuk itu dari Fraksi PKB tidak akan detail, takut ditanya sama Pak Ketua kenapa harus detail. Jadi kami hanya secara umum saja Ketua. Bahwa kami prinsipnya PKB mendukung apa yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih banyak PKB atas ... mendukung Pak. Paham atau tidak paham didukung. Tapi tadi PKB mendukung setelah memahami situasinya.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati jajaran Kejaksaan Agung,

Kalau bicara konteks penganggaran, walaupun saya tidak di Banggar tapi tetap saya tidak ada yang pesan Pak Ketua. Tapi yang pesan rakyat kepada saya untuk melakukan pengawasan secara konstitusi terhadap Jaksa Agung.

Kalau melihat konteks item-item yang tadi sudah dilakukan. Memang ada prestasi, berkaitan dengan persoalan efisiensi sebesar 162 Miliar Rupiah dan harapan dari kejaksaan adalah pemulihan anggaran. Artinya *me-return* mengembalikan kembali pada pos anggaran yang ada di Kejaksaan. Cuma memang ketika kami, saya berkunjung ke beberapa institusi didaerah Kajari, tatanan Kajati dan lain-lain. Kalau bicara konteks memang fasilitas, apalagi diluar pulau Jawa bahkan di Manado kemarin. Ya jujur saja, kalau saya mungkin jadi pejabat tidak berani. Kalau jadi Kajari, atau jadi apa di

kepulauan-kepulauan begitu naik perahunya kecil, ombaknya besar dan lain-lain. Itu pun kami hargai sebagai wakil rakyat terhadap institusi kejaksaan yang berjuang untuk menegakkan keadilan di daerah-daerah yang sangat terpencil. Tapi harapan saya adalah kaitan dengan pengajuan penganggaran ini, kalau toh memang kejaksaan membutuhkan untuk membangun konstruksi penegakan keadilan yang lebih bagus lagi, memberikan *supporting* terhadap institusi kejaksaan agar melaksanakan sesuai dengan tupoksinya sebagai unsur penegak hukum maka harapan saya adalah ketika ini diajukan kekurangan anggaran, total 390 Miliar Rupiah dari item-item ini memang ada catatan dari saya. Kaitan dengan Rusunawa, pertama. Kedua, pengadaan terhadap kontrak pengindraan dan persandian. Karena begini Pak, dengan konteks yang sifatnya kayak begini. Ini kan perlu detail juga disampaikan kepada kita nanti karena 97 Miliar tambahan ini. Ini kaitan dengan hal-hal yang memang sangat sulit terukur. Karena pengadaan persandian dan pengindraan ini kan kaitan dengan alat-alat yang sifatnya teknologi yang sangat tinggi sehingga kita butuh hal-hal seperti ini disampaikan kepada kita bahwa ini loh penggunaan. Dan yang paling intinya adalah outputnya apa? Ketika bikin rusunawa, ketika ada alat pengindraan, persandian, *output*-nya apa sih terhadap kinerja kejaksaan yang akan dirasakan oleh masyarakat kita. Apakah ketika dikasih ini, kinerja kejaksaan akan lebih cepat, lebih enerjik, lebih melakukan akselerasi dan lain-lain ini pun harus jelas. Jadi ketika penganggaran itu dilakukan yang dibutuhkan oleh kita adalah *output* terhadap penganggaran ini yang mampu memotivasi dan mendukung institusi kejaksaan bekerja lebih baik. Itu harapan bagi kita sebagai wakil rakyat.

Kedua, kaitan tentang eksekusi yayasan super semar. Ini pun tidak ada yang pesan. Cuma karena ini adalah dalam beberapa berita saya dengar bahwa dibutuhkan anggaran 2,5 Miliar Rupiah untuk eksekusi. Nah ketika anggaran ini dikeluarkan sedangkan ketika di eksekusikan fungsinya ada di pengadilan. Nah pertanyaan saya adalah, berapa sih sebetulnya asset super semar yang sudah dilakukan verifikasi oleh kejaksaan yang sudah dilakukan, kalau itemnya sudah disebutkan disini. Asset beasiswa super semar terdiri dari 113, rekening, deposito, giro, 5 mobil, 2 bidang tanah dan bangunan. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya nilai asset ini berapa? Sehingga kenapa kejaksaan membutuhkan 2,5 Miliar? Sedangkan eksekusi menurut saya itu dilakukan di pengadilan. Kalau misalnya asset yang direkeningnya itu sekian, kita keluarkan dana sekian untuk melakukan eksekusi. Kalau itu memang mengembalikan uang itu kepada negara dan untuk kepentingan negara saya pikir tidak ada persoalan.

Prinsip dasarnya saya mendukung kalau kebijakan penambahan anggaran ini adalah *output*-nya jelas. Memberikan daya dukung terhadap kinerja-kinerja kejaksaan berikutnya. Dan memberikan semangat kepada kejaksaan termasuk juga kaitan melakukan proses penghargaan *reward and punishment* terhadap kerja pekerja yang ada atau pegawai-pegawai kejaksaan yang ditempatkan di kepulauan, bahkan sampai di Natuna disana. Itu misalnya mereka 3 tahun, 4 tahun mendem disana tidak pernah ada *reward* sama sekali. Bagaimana fungsi tentang kaitan ... seperti itu.

Itu saja Pak Ketua menjadi catatan saya. Dan mudah-mudahan ketika kita melakukan RDP, Rapat Kerja, Dengar Pendapat, dengan kementerian, berkaitan anggaran dan lain-lain, memberikan nuansa baru, memberikan *supporting* baru, memberikan perubahan terhadap wajah kejaksaan yang lebih baik kedepan.

Terima kasih.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Waminkum,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih PAN.
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (DIDIK MUKRIANTO, SH., MH):

Terima kasih Pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Mohon ijin saya Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jatim IX Bojonegoro Tuban.

Pimpinan, Anggota DPR RI dan Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang kami hormati,

Terkait dengan apa yang dibahas hari ini, terkait dengan pembahasan anggaran. Tentunya kita semuanya mempunyai kesamaan pandang, punya kesepakatan bahwa sebagai institusi penegak hukum wajib hukumnya, kami semuanya untuk mendukung kinerja Kejaksaan Agung sepanjang kinerjanya didasarkan kepada sebuah profesionalitas, independent, tidak tebang pilih dan transparan. Nah itu tentunya harapan kita semuanya agar rasa keadilan ini bisa segera ter-realisasikan dan harapan masyarakat juga dalam mengakses hukum itu atau keadilan bisa segera terpenuhi.

Bapak Jaksa dan jajaran yang saya hormati,

Sebelum kami menyoroti beberapa usulan tambahan anggaran pada APBNP ini. Mungkin ada baiknya kami mengingatkan kepada Bapak terkait dengan kepatuhan institusi kejaksaan terhadap perundang-undangan kita. Karena didalam undang-undang MD3 kita di Pasal 227 terkait dengan hak pengawasan Dewan. Disitu disebutkan bahwa sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan Kementerian/Lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait, bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR. Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan kepada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diakses oleh public. Artinya apa? kami hanya ingin mengingatkan, seberapa jauh kemudian lembaga Kejaksaan Agung itu sebagai penegak hukum kemudian menaati apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3 ini. Sejauh ini setahu saya bahwa setelah pembahasan APBN dalam jangka waktu 30 hari setelah ditetapkan di Rapat Paripurna saya pribadi belum menerima jenis belanja yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut. Harapan kami ketika jenis belanja tersebut diserahkan kepada kami, kami pun juga bisa ikut mengawasi kemudian bisa juga berikutnya didalam, pembahasan anggaran berikutnya kami juga bisa

membantu Kejaksaan dalam merencanakan ataupun bisa memahami apa yang diinginkan kejaksaan dalam proses pengusulan anggaran seperti hari ini. Nah ini yang menjadi *point critical* bahwa lembaga Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum saya berharap ini juga mematuhi apa yang menjadi kewajiban konstitusional dari Undang-Undang MD3 ini. Bukan kami yang meminta tapi Undang-Undang ini Bapak.

Terkait dengan beberapa usulan dari Kejaksaan Agung yaitu yang kami melihat, tadi disampaikan ada 5 point tentunya sebelum masuk ke situ, kami juga tadi mendengar dari paparan Bapak Jaksa bahwa Kejaksaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan juga melakukan pemangkasan-pemangkasan anggaran. Nah didalam pemangkasan anggaran didalam point 1 disebutkan kurang lebih ada 162 Miliar yang dilakukan oleh Kejaksaan. Namun demikian dari pemangkasan ini kami melihat ada 1 point yang juga ini juga menjadi kritikal buat kami yaitu terkait dengan anggaran didalam konteks penanganan perkara Pidum. Nah kalau menurut atau data yang kami peroleh, ataupun pengamatan ataupun kunker-kunker didaerah bahwa penanganan perkara Bidung hingga Maret Tahun 2016 ini sudah mendekati jumlah anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan. Ini baru bulan Maret. Padahal kalau Maret kita menuju Desember masih sangat jauh. Nah kalau kemudian di dalam penganggaran Pidum ini kemudian juga dipotong, padahal hingga Maret sudah mencapai anggaran. Kemudian penanganan Pidum yang kedepan ini Kejaksaan menganggarkan darimana. Sumbernya mesti jelas. Karena kalau kita melihat bahwa ... Pidum ini sumbernya dari APBN. Kita ingin juga mendapatkan transparansi atau penjelasan dari kejaksaan. Kalau Maret saja ini sudah mendekati anggaran yang diajukan untuk penanganan perkara Pidum kebelakang mau diambilkan anggaran darimana. Nah jangan sampai kemudian bahwa kejadian di Kejaksaan juga terjadi bahwa kejaksaan menganggarkan untuk perkara Pidum ada sekian jumlah tapi ternyata capaiannya bisa mencapai 995% keberhasilannya. Nah kita ingin bahwa disatu sisi bahwa keterbatasan anggaran didalam ... ini menjadi persoalan kita. Tetapi di sisi lain ternyata outputnya perkara yang ditangani didalam tahun tertentu ini luar biasa besar. Nah kita ingin transparansi anggarannya darimana. Artinya ini juga kami yang ingin mendapat penjelasan dari kejaksaan.

Kemudian juga terkait dengan pembiayaan rumah sewa saya pikir pada kesempatan hari ini kalau demi kelancaran dan efektivitas kinerja maka perlu disampaikan kepada kami urgensi ini kemudian konsepsi besarnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini karena saya pikir ini bukan hanya terkait dengan persoalan yang ada di lingkungan kejaksaan RI tapi didaerah-daerah, teman-teman Jaksa didaerah ini juga punya persoalan yang sama. Sehingga kami berharap dari Fraksi Demokrat bahwa desain besar atau konsepsi besar yang kemudian bisa diterjemahkan didalam *blueprint* dalam mengatasi persoalan tempat tinggal ini juga menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian juga selain terkait dengan tempat tinggal di Rusun ini Pak Jaksa Agung menyampaikan di point 5 bahwa ini didalam konteks pengawasan ini juga ada rumah sewa buat Pejabat Eselon II. Nah ini kita bahwa penyelesaian persoalan-persoalan terkait hal ini bisa di klasifikasi atau di kelompokkan didalam 1 kelompok sehingga *blueprint*-nya jelas Pak. Kalau disini kita bicara perumahan buat pegawai tapi didalam pengawasan juga ada lagi pegawai. Nah bagaimana konsepsi penganggaran atau system penganggaran ini juga menjadi bagian yang harus diatur dengan baik dan sama dengan kawan kami dari PPP bahwa terkait dengan peralatan kontra penginderaan dan persandian. Kami tentunya di dalam efektivitas kinerja kejaksaan kami mendukung. Tapi

bahwa kami belum melihat bahwa bagaimana Bapak merasionalkan kepada kami angka 97 Miliar itu dalam bentuk perencanaan ataupun desain besar dengan dibelinya alat ini. Mungkin untuk apa, targetnya sampai seberapa. Kemudian transparansinya apa, bagaimana caranya. Nah ini kami ingin mendapatkan gambaran-gambaran yang agak lebih teknis sehingga kami bisa memahami kebutuhan Bapak terkait dengan permohonan anggaran untuk kontrak penginderaan. Tentunya ini mudah-mudahan juga penggunaannya ini juga akuntable, terukur. Nah ini yang kita inginkan ketika kita memberikan dukungan biaya ... mendapat penjelasan secara utuh. Dan untuk biaya eksklusi besarnya 2,5 M tentu kritik buat kejaksan, masukan dari kami bahwa kami khawatir bahwa di masa-masa mendatang. Ketika ada biaya-biaya eksklusi tertentu harus dianggarkan didalam bentuk anggaran seperti ini. Karena anggarannya ini juga menjadi anggaran yang menurut saya ini bisa di kelompokkan dalam kelompok-kelompok biaya lain.

Nah menurut hemat kami, sebenarnya kami mendukung tapi ketika setiap penganggaran biaya eksklusi kemudian saat ini dianggarkan tersendiri seperti ini, kami khawatir Bapak kesusahan lagi kedepan ketika ada biaya-biaya eksklusi Bapak harus mengajukan didalam tiap perubahan anggaran ataupun pada saat pembahasan anggaran. Nanti target-target atau capaian Pemerintah terkait pemulihan asset-aset atau perampasan asset ... pidana ini tidak akan tercapai karena menunggu pembahasan anggaran. Kalau anggaran tidak dianggarkan atau anggaran tidak disetujui maka apa yang diharapkan oleh negara ini akan kembalinya asset atau ... asset tidak tercapai. Nah ini kritik saja dan masukan. Mudah-mudahan kedepan Bapak lebih arif, bijaksana dalam menganggarkan ini sehingga Bapak tidak kesulitan sendiri didalam menentukan pos-pos terkait dengan penganggaran ini.

Nah itu yang dapat kami sampaikan. Artinya kami ingin Pak didalam sidang yang terhormat ini bahwa usulan Bapak tambahan anggaran biaya atau pun anggaran APBN ini bisa dirasionalkan sedetail mungkin sehingga kami betul-betul bisa memahami, sesungguhnya kebutuhannya untuk apa karena tadi kalau bertumpu kepada pemikiran Pak Benny tadi jangan sampai kita ini kemudian menyetujui sesuatu yang kita sendiri tidak memahami konsepsi dasar atau utuh serta tujuannya.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih penjelasan, masukan dari Fraksi Partai Demokrat. Juga pertanyaan tadi lebih menukik lagi Pak Jaksa Agung, mengapa dianggarkan khusus untuk eksekusi perkara yayasan beasiswa Super Semar. Jadi *latching* sekali ini kan. Padahal banyak kasus, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kenapa tidak dianggarkan biayanya untuk dieksekusi. Saya tidak mau kasih tahu kasus yang mana, kan sama-sama tahu kita kan begitu. Iya kan Pak Agung. Atau mau tambahkan Demokrat? Jadi ya mohon maaf, kita sudah sama-sama tahu kasus-kasusnya, kita tidak ingin bikin bulan. Kan sudah terang bulan ini, mau bikin kayak apa lagi. Mohon penjelasan itu Pak Jaksa Agung.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (DR. IR. SUFMI DASCO AHMAD):

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi Partai Gerindra. Sehubungan dengan penambahan anggaran bahwa kita tahu Kejaksaan rata-rata diseluruh Indonesia hanya bisa menangani 20% dari perkara karena keterbatasan anggaran. Sehingga untuk penambahan anggaran penanganan perkara, baik pidana umum maupun pidana khusus maupun pidana khusus menurut kami memang sangat perlu. Namun yang perlu kemudian kami dalam adalah seperti tadi yang rekan-rekan sampaikan tentang adanya pengadaan peralatan kontra penginderaan dan persandian yang sesuai dengan standar keamanan informasi. Itu senilai 97 Miliar 787 sekian. Kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang kemudian mengadakan peralatan sejenis. Ini justru harganya lebih murah. Lebih murah sehingga kami khawatirkan bahwa tujuan yang akan dicapai dengan pengadaan alat ini tidak tercapai sehingga mungkin perlu dikaji lebih mendalam tentang alat yang akan dibeli ini. Dan kami usulkan mungkin bahwa alokasi daripada penggunaan, pembelian alat-alat ini dialokasikan ditambahkan untuk alokasi penanganan perkara yang walaupun ditambahkan menurut kami masih kurang. Nah sementara dengan kajian yang mendalam mungkin untuk alat-alat penginderaan dan persandian ini bisa dialokasikan secara khusus dan detail pada pada tahun depan.

Demikian Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Gerindra yang mempertanyakan pembelian alat. Sama dengan PPP tadi ya.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golongan Karya.

F-PG (IR.H. ADIES KADIR, SH., M.HUM):

Baik.

Atas seijin Bapak Sekretaris Fraksi Golkar.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi,
Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta jajaran,**

Sebelum kami masuk ke anggaran ada hal lain-lain yang ingin kami tanyakan kepada Jaksa Agung beserta jajaran. Terkait dengan banyaknya barang sitaan negara yang dikelola oleh Kejaksaan. Banyak informasi barang-barang sitaan negara yang dikelola itu tidak terurus dengan baik. Terakhir adanya oknum internal kejaksaan untuk kepentingan pribadi menggelapkan barang sitaan tersebut, di NTT. Kami ingin tahu bagaimana manajemen kejaksaan agung dalam pengelolaan barang-barang sitaan negara tersebut. Kemudian barang sitaan tersebut apabila tidak terawat dan lama

harganya juga, nilainya akan turun. Kenapa tidak segera dilelang saja untuk dimasukkan kas negara.

Kemudian yang kedua, dari hasil kunjungan kerja kami ke beberapa daerah banyak sekali keluhan dari Jaksa bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan melebihi dari jumlah anggaran yang diterapkan. Khususnya untuk perkara-perkara pidana umum dan pidana khusus. Ini sangat berbahaya karena mereka menggali dana-dana sendiri. Mencari dana-dana sendiri untuk menutupi anggaran yang kurang. Bahkan kadang anggaran yang turun itu dibagi habis. Bisa dibayangkan sangat minim sekali anggaran yang dipakai untuk menangani suatu perkara pidana khusus misalnya. Ini sangat riskan Bapak. Kami mohon supaya hal ini lebih diperhatikan agar supaya pekerjaan-pekerjaan Jaksa di daerah lebih baik.

Nah memasuki masalah APBNP. Memang kebetulan kami juga di Badan Anggaran, untuk anggaran kejaksaan masih dalam pembahasan yang cukup panjang. Tapi mudah-mudahan karena melihat kebutuhan ini sangat urgen. Kami harapkan juga Kejaksaan bisa mendapatkan tambahan itu. Kami melihat di halaman 6, ada sudah dimasukkan untuk program penanganan perkara pidana umum dan Pidsus. Di halaman 7 itu termasuk di pemulihan anggaran di angka 162 Miliar sekian. Nah yang jadi pertanyaan kami adalah kembali ke halaman 6 di program 1. Itu ada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kejaksaan RI sebesar 131 Miliar lebih. Anggaran untuk penanganan perkara umum, pidana umum dan pidana khusus itu hanya 8 Miliar untuk pidana umum dan 23 untuk pidana khusus. Kami tidak mempersoalkan besara anggaran ini walaupun ini sangat tinggi sekali. Cuma kami ingin tahu, dipergunakan untuk apa saja *brakedown*-nya yang 131 Miliar lebih ini. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI. Ini kami belum melihat untuk apa-apa saja ini. Kami besarnya tidak terlalu mempersoalkan tapi kami ingin tahu apa saja dukungan manajemen itu dan pelayanan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI itu apa saja.

Kemudian tadi sudah banyak dibahas oleh rekan-rekan dari Fraksi yang lain terkait dengan pembiayaan rumah susun sewa. Kami hanya ingin menanyakan, kami tidak mempermasalahkan sekali lagi rumah susun sewa karena memang juga penting dan diperlukan untuk pegawai-pegawai Kejaksaan. Yang ingin kami tanyakan adalah ini rumah susun sewa. Biasanya sewa itu sudah termasuk dengan fasilitas dan lain-lain. Nah ini sewa seperti apa, karena ada pekerjaan berkaitan dengan *genset*, berkaitan dengan rumah pompa, berkaitan dengan PJU, instalasi taman, gondola, kemudian rumah genset, pos jaga. Ini semua belum ada. Nah ini sewa Cuma sewa gedung. Itu saja atau sewa seperti apa atau model sewa seperti apa atau model sewa seperti apa yang diberlakukan terhadap rumah susun sewa ini. Terhadap yang lainnya, kami mendukung termasuk juga pengadaan penambahan anggaran untuk pengawasan. Ada penambahan kendaraan roda empat Eselon II pada Jamwas, kami sangat mendukung karena kami tahu betul di daerah banyak sekali Jaksa yang kendaraannya sudah, istilahnya sudah butut Pak, rongsokan. Mungkin tidak bisa dipakai keliling 24 jam. Sebentar-sebentar mogok. Jadi kami sangat mendukung untuk pengadaan kendaraan roda empat ini.

Sementara itu Pimpinan dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

Wabillauhitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PDI-Perjuangan.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mohon kita sepakati lagi Pak. Sekarang jam 12.00, kita tambah 1 jam? Setengah jam Pak? Pak Ketua, setengah jam? Doktor Aziz adalah ketua yang lalu Pak. Jadi sekarang ini dan selalu begitu Pak. Presiden juga begitu. Presiden kesatu, Presiden kedua, ketiga sampai seterusnya. Begitu juga Ketua Komisi. Ketua Komisi III yang lalu. Jadi sampai jam 12.30.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang kami hormati,

Setelah kami membaca, mendengar uraian dari Pak Jaksa Agung khususnya mengenai penghematan Pak. Saya terus terang kaget sekali Pak Jaksa Agung, merespon secara positif penghematan ini Pak. artinya, saya kecewa kok dalam fungsi penegakan hukum dilakukan penghematan Pak. Yang saya lebih kecewa Jaksa Agung membuat surat pernyataan. Aneh bagi saya Pak. Kok harus ada surat pernyataan Pak. Menurut saya, alangkah baiknya apabila Pak Jaksa Agung membuat suatu argumentasi kepada Kementerian Keuangan Pak tentang permintaan penghematan anggaran untuk fungsi penegakan hukum. Tidak bisa dibayangkan dana yang, anggaran yang mestinya masih kurang dikurangi lagi Pak. Kan begitu. Kita pernah Raker di tempat ini pada tanggal 20 Oktober 2015. Yang dalam hal itu di ... oleh Pak Jambin tentang ada 8 program. Dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas hingga program penanganan dan penyelesaian perkara Datun Pak. itu saja anggaran masih sangat kurang. Mungkin Pak Jaksa Agung belum mendengar. Di daerah itu Pak, saya bertemu dengan beberapa Kajari. Mereka sudah menyeleksi untuk menangani perkara Pak. Sudah mereka seleksi ... perkara. Sekarang perkara untuk korupsi perkara 1 tahun. Padahal fakta Pak di daerah itu. Paling sedikit mereka menyidik perkara korupsi itu 10 Pak, darimana mereka dapat

anggaran. Kejaksanaan dituntut untuk bisa memacu pemberantasan pidana korupsi ini sama dengan lembaga yang lain, dengan KPK.

Oleh karena itu menurut hemat saya, Pak Jaksa Agung. Tidak alasan untuk mengurangi anggaran dalam rangka fungsi penegakan hukum. Yang kedua, tentang permintaan dari Pak Jaksa Agung yang ... tinggal Pak Jaksa Agung membuat secara rinci Pak. Dibikin rinci saja Pak. Karena kami di Komisi III akan merespon pengajuan dari Pak Jaksa Agung tentang anggaran yang dibutuhkan. Sebagaimana tadi teman-teman mengatakan agar dibuat juga secara rinci, kami juga berharap Pak Jaksa Agung buat secara rinci. Untuk 300 sekian Miliar ini perinciannya kemana saja.

Pak Jaksa Agung,

Yang paling menarik Pak, saya tidak bisa bayangkan Kajari kost. Mereka kost Pak. Bahkan di rumah saya ada kost Pak, ... Pak Jaksa. Di rumah saya itu kost Pak, Jaksa. Mereka tidak punya mobil, Kajari tidak punya mobil. Saya sudah coba komunikasi dengan para Bupati disana, mereka takut kepada KPK. Nah ini coba Pak Kajaksa Agung memikirkan bagaimana caranya agar para Jaksa di Kabupaten didaerah itu ya bisa bekerja maksimal tetapi tentu kita perhatikan juga. Kebutuhan mereka Pak disana. Saya bicara begini Pak, karena memang saya melihat. Merasakan bagaimana didaerah sana Pak. Di Dapil saya Sumut 3, Sumut 2, bahkan Sumut 1 Pak. saya bisa mengatakan ... itu Pak, ya Sumut 1, 2, 3. 60% para Jaksa itu kost semua Pak. Ini kan sensitive. Sangat sensitive ini Pak. Tidak bisa dibayangkan perkara 10 untuk korupsi tetapi anggaran Cuma 1 Pak. Ini bagaimana? Mestinya Pak Jaksa Agung menerangkan didalam Rapat Kerja ini Pak, didalam buku ini Pak. Jadi kita betul-betul bisa menerima secara baik. Dan kita juga bisa memperjuangkan Pak mengenai anggaran ini. Jadi jangan selalu Jaksa Agung, Kejaksanaan dituntut melulu untuk lebih tetapi diminta untuk hemat Pak. Saya khawatir dengan munculnya istilah penghematan ini perkara juga dihemat Pak nanti. Ada kejaksanaan-kejaksanaan yang sudah tidak mau terima perkara Pak. Ya mereka khawatir Pak, perkara akan berhenti ditengah. Kekurangan anggaran Pak. Ada, nanti saya kasih bukti mengenai itu Pak. Belum lagi ada kantor Jaksa yang hampir rubuh Pak. Ini bagaimana Pak. Saya bawa ini Pak. Ada proposal dari suatu daerah Pak. Mereka sudah ajukan semenjak 2013 dan saya sudah kesana Pak. Saya naik ke lantai 2 sudah goyang Pak. Karena beban saya diatas 100, saya takut jatuh juga disana Pak. Itu bagaimana.

Jadi tolong Pak Jaksa Agung dengan jajaran juga, tidak langsung mengiyakan permintaan dari Kementerian Keuangan. Mestinya Bapak-bapak memberikan alasan kepada mereka bahwa anggaran kami tidak bisa dikurangi bahkan mestinya ditambah. Terbukti kan sekarang pada saat meminta tambahan. Seperti misalnya Pak, biaya kinerja Satgasus itu saya kira sangat tinggi Pak. Di sisi lain Pak Jaksa Agung, mengiyakan permintaan dari Kementerian pengurangan 23 Miliar Pak untuk Bitsus. Padahal setahu saya sangat kurang sekali Pak ini. Oleh karena itu tolong agar Pak Jaksa Agung dan jajaran dan Pak Jambin membuat secara rinci dan rill Pak mengenai anggaran supaya tetap sasaran dan memang fungsi penanganan hukum itu bisa dicapai dengan anggaran. Jangan nanti muncul nanti istilah karena ada penghematan Pak maka perkara juga akan dihemat disana. Didaerah sana Pak sudah banyak menjerit Pak Jaksa, para Kajari Pak. Kadang-kadang saya malu berkunjung Pak. Karena mereka akan berbicara tentang bagaimana perkumpulan mereka disana Pak. Di Siantar, Simalungun, Dairi, Tanah Karo Pak bahkan batubara. Nah coba ini Pak dipikirkan dan direalisasikan Pak. Biar mereka

bisa ... baik dan kita juga kalau turun kesana itu Pak merasa betul-betul melakukan fungsi pengawasan Pak. Ini apa yang kita awasi Pak. Disana kekurangan Pak. Yang diawasi itu mestinya yang betul-betul ada yang bisa kita awasi. Ini yang kita awasi itu tidak ada, kurang semua disana Pak.

Yang terakhir Pak, saya ingin bertanya tentang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tentang PK ini. Para Jaksa di daerah Pak, sekarang ini bingung. Saya kemarin baru kembali dari daerah. Saya ketemu dengan Pak Nasir Jamil juga didalam pesawat Pak. Mereka bertanya demikian Pak, kalau misalnya Pasal putusan MK ini. Ditingkat pengadilan negeri terbukti, lalu terdakwa banding terbukti, lalu terdakwa kasasi tidak terbukti Pak. Pertanyaan, apakah kami bisa PK. ... dijawab ke daerah apk. Jadi biar mereka juga bisa mengambil sikap disana Pak. Kalau saya menjawab tentu saya punya jawaban Pak. Sepanjang itu untuk penegakan hukum kenapa tidak. Kalau saya menjawab Pak. Nah ini menjadi bagian dari kendala di daerah sekarang Pak, pas ... MK. Apakah putusan MK itu berlaku hanya untuk putusan bebas di tingkat 1 atau memang berlaku sampai tingkat kasasi Pak. Ini perlu diperhatikan Pak Jaksa Agung. Demikian juga dengan anggaran untuk sarana-prasarana, ini sangat konkrit diperlukan. Bukan di Jakarta saja Pak. Kalau Jakarta Rusunawa, kalau disana Pak Kosanawa Pak. Kos-kosan.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Yang dimaksud *costly*, kos atau apa?

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Kos. Jadi mereka tinggal di rumah. Bukan sewa. Mereka tinggal di rumah penduduk. In the kost. Makan di kedai. Bisa dibayangkan Pak. Ada Kajari juga. Saya kira Pak ... sudah tahulah dengan ... saya sudah bicara tadi mengenai ini. Ini keluhan dari bawah Pak. In the kost.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Soalnya berulang kali kost. Saya usahakan nangkap apa, maksudnya kost itu.

Baik.

Selanjutnya dari meja Pimpinan.

F-GERINDRA (H. DESMOND JUANIDI MAHESA, SH.,MH):

Terima kasih Pak Benny.

Saya yang pertama mengingatkan kepada kita semua termasuk Jaksa Agung. Persoalan ketimpangan-ketimpangan anggaran dibberapa mitra kita. Khususnya persoalan Pidum dan Pidsus misalnya. Kalau di Kejaksaan, penyelidikan 25, di KPK 122, di kepolisian sekitar 50 sampai 60. Penuntutan di Kejaksaan itu 25, di KPK 155.

Penyidikan 50 di Kejaksaan, penyidikan di KPK 133. Ini bicara tentang anggaran berbasis kinerja. Bagaimana mungkin kita menuntut kinerja Kejaksaan bagus kalau kita sendiri tidak memikirkan ketimpangan-ketimpangan ini. Ini catatan kita. Persoalan yang bagi kita di Komisi hari ini adalah, Pemerintah hari ini melakukan pemotongan karena memang negara kekurangan uang. Saya mengharapkan kedepan catatan-catatan ini, bagian yang harus kita lakukan ... Lembaga-lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan proses ini kita duduk bersama. Saya mengharapkan Pak Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPK, Sekjen MA juga berkaitan dengan ini agar kita bisa mengevaluasi dalam rangka kebijakan agar berbasis kinerja ini suatu keseragaman. Pada proses pengawasan sesuai dengan Undang-Undang MD3 kita mengharapkan juga sesuai dengan Undang-Undang itu sesudah diketuk beberapa sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kita mendapatkan dokumen-dokumen itu agar kita bisa melakukan pengawasan dengan baik. Agar pada saat kita mengevaluasi Rapat Kerja seperti ini kita pun agak lebih enak. Agak lebih enak menuntut tentang kinerja, apakah untuk penambahan atau pengurangan. Jadi kita menseragamkan cara kita melakukan kebijakan-kebijakan anggaran terhadap mitra kita yang berkaitan dengan program-program di usulan, di APBN atau APBN ... agar kita kedepan bisa melihat kinerja itu. Kalau kinerja Kejaksaan lebih buruk ini yang harus kita sebagai mitra bagaimana. Ya tugas kita melakukan pengawasan dan mengkritik atas kekurangan-kekurangan yang ada. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentang usulan tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2016. Saya juga mengingatkan kita agak berhati-hati dengan usulan tambahan. Kenapa? Negara kondisi hari ini ada gak duitnya. Tambahan ini posnya yang mana akan kita tambah disini. Jangan kayak Pak Dis dari Golkar setuju tentang ini, mungkin dia sudah tahu sumber dananya. Saya belum tahu makanya saya mengingatkan ini. Apakah kita memindahkan anggaran mitra lain kesini? Ini juga yang harus diwaspadai. Begitu juga dengan persoalan IT. Karena ada 2 hal, sumber dananya dimana penambahan ini. Apakah sudah ada persetujuan Menteri Keuangan dan macam-macam itu, apakah kita setuju atau tidak? Misalnya pendapat dari Fraksi Gerindra, itu anggaran untuk IT ternyata lebih murah. Bagaimana kebijakan kita terhadap mitra yang lalu, yang tinggi, apakah ini ada unsur *mark-up*. Yang paling berbahaya adalah pada saat kita setuju disini, setuju disana, siapa yang ngomong tentang anggaran yang berkaitan dengan IT. Jangan-jangan ini ada project apa nih. Ini kan bisa ... KPK dan catatan-catatan ini tolong kita berhati-hati. Jangan setuju tidak setuju pada proses ini. Kita harus berhati-hati dulu. Karena kita tidak bicara tentang sector mitra kita Kejaksaan saja. Karena Komisi membicarakan tentang sinkronisasi anggaran agar kita melakukan kebijakan-kebijakan politik anggarannya pun secara jernih dan jelas. Basisnya tentu kinerja-kinerja itu. Itu catatan yang kedua.

Catatan yang ketiga bagi saya, ini kritik juga walaupun saya memahami persolan kebutuhan Jaksa-jaksa di daerah. Mobil ... dan macam-macam. Tapi saya dan beberapa kawan di Komisi III sebagai pengurus Kadin misalnya, dan pengurus Ardin dan beberapa organisasi pengusaha itu, di Komisi III juga ada. Ada catatan penting Pak Jaksa Agung. Pada rapat kita di Ardin dan di Kadin. Banyak kawan-kawan kita di daerah yang berkaitan dengan anggaran APBN ini, yang berkaitan dan pembiayaan ini. Keluhan-keluhan ini dianggap mereka adalah keluhan yang mengada-ada juga. Kenapa? Hampir semua pengusaha daerah, baik yang berkaitan dengan di Tingkat II ataupun di Tingkat Provinsi. Ini kan kayak sudah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri itu sudah kayak menunggu

sesuatu setiap project-project APBN yang berkaitan ini. ... (suara tidak jelas). Ini bukan sesuatu hal yang baru bagi Bapak-bapak yang pernah didaerah. Nah persoalannya adalah kebutuhan-kebutuhan yang hari ini didaerah tentang campurtasi, rumah, dan macam-macam itu dan prilaku-prilaku ini juga bagaimana sebenarnya. Ini catatan penting bagi kita dan Pak Junimart jangan pura-pura gak tahu ini. Hampir semua kunjungan kerja kita selalu kalau kita ketemu dengan pengusaha keluhannya sama. Jadi saya Cuma mengingatkan disamping bahwa kita harus memikirkan bagaimana persoalan-persoalan mitra dengan baik, juga kita memikirkan tentang kinerja didaerahnya citra kejaksanaan ini juga harus diperbaiki. Ini catatan-catatan yang ketiga.

Catatan yang keempat, tentang kinerja kejaksanaan juga. Hari ini ada beberapa kasus-kasus yang terberitakan bahwa kejaksanaan itu kalah-kalah-kalah. Ini kan juga berbasis dengan kinerja. Kesan saya kalau kalah itu ada sesuatu yang salah, apakah dalam misalnya dalam kasus Surabaya itu kita tahu bahwa orang yang bersangkutan dekat dengan Ketua MA misalnya, tapi itu kan asumsi. Kalah berkali-kali misalnya, atau kasus di Bangka pada saat kasus ... Bagi saya ini kan bicara tentang kinerja dan anggaran ini pemborosan. Ini tidak ada prestasi. Nah catatan-catatan ini juga saya ingatkan kepada kawan-kawan di Komisi III termasuk Kejaksanaan Agung bahwa persoalan-persoalan ini kan adalah hubungan kita sebagai mitra. Kalau kita memberikan keleluasaan-keleluasaan seperti ini terus tapi juga kami dihargai dalam konteks pengawasan kami. Inilah gunanya DPR ada di Republik ini. Atau ... inilah yang sebenarnya kalau kita ngomong agak kencang dan macam-macam bagi kami, kami sayang Kejaksanaan. Kami ingin Kejaksanaan dibangun dengan baik karena citra kejaksanaan buruk, mitra kami pun di DPR khususnya di Komisi III juga buruk. Inilah catatan-catatan kami di meja Pimpinan agar nanti Kamis pada saat kita pleno tentang pada saat kita pleno tentang pengambilan keputusan-keputusan itu kajiannya mendalam dan jernih, apakah penambahan anggaran ini sumbernya darimana? Apakah pengurangan ini tidak membuat kejaksanaan kinerjanya lebih turun lagi. Nah saya harapkan inilah pemikiran-pemikiran kita dalam rangka. Kita bermitra dengan mitra-mitra kita dalam proses penegakan hukum. Kenapa? Kesimpulan politik hukum hari ini adalah pemerintahan ini yang paling buruk penegakan hukumnya. Nah kalau penegakan hukumnya yang paling buruk tentunya kinerja, mitra kerja kita harus berikan yang lebih baik dengan dana yang lebih baik agar citra pemerintahan yang penegakan hukumnya buruk tidak panjang lagi. Harus sama-sama kita dorong mitra-mitra kita untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum ini. Ini tentunya bagian dari tugas-tugas kita sebagai wakil rakyat di Komisi III ini.

Terima kasih Pak Benny.

KETUA RAPAT:

Pagi ini sudah mau jam 12.30. Kita akan kasih kesempatan kepada Pak Jaksa Agung untuk memberikan penjelasan tadi. Untuk itu saya mohon perpanjangan waktu 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

Kami persilakan Pak Jaksa Agung untuk memberikan penjelasan.

JAKSA AGUNG RI:

Baik.
Terima kasih.

Pimpinan Rapat Kerja serta segenap Anggota Komisi III yang saya hormati dan saya muliakan,

Saya sempat berbesar hati karena hampir sebagian besar dari Anggota Komisi III memahami kondisi kami. Memahami keterbatasan kami, dan memahami permasalahan kami berkaitan dengan anggaran ini. Dan kami juga sangat bersyukur karena bagaimana mungkin bisa menuntut kejaksaan bekerja dan bekerja lebih baik seperti halnya dengan KPK kalau anggarannya masih sangat minim bahkan kurang. Ini suatu hal yang tentunya sangat membuat kami tersentuh dan terharu terus terang.

Semuanya mengetahui tentunya ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Keluhannya hampir sama. Seperti saya katakan tadi dalam pengantar bahwa keluhan keluhan, dan keterbatasan dan bahkan ketiadaan anggaran ini bukan hanya dirasakan oleh pusat dan juga daerah. Tadi disampaikan bahwa memang benar bagi setiap kejaksaan negeri itu hanya disediakan satu perkara untuk dibiayai. Sementara di sisi lain dari Pak ... juga sangat mengkhawatirkan jangan sampai nanti penanganan perkara pun di hemat. Ini fakta Pak. Tapi ini kenyataan yang kita hadapi. Bahkan saya katakan tadi untuk mengawal Bapak menjadi Anggota Dewan pun ketika Pilpres, Pileg dan Pilkada itu kami tidak ada biaya sama sekali. Padahal kami dituntut untuk bekerjasama dengan instansi yang lain ketika kita tergabung dalam Kagumdu. Ini fakta. Jadi ini semua tentunya saya katakan tadi, sepenuhnya kejaksaan betul-betul selama ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan ingin memberikan kontribusi kepada ... bangsa ini. Jadi kalau ada kurang-kurang atau kurang lebihnya tentunya bisa dikurangi kesana. Saya kemarin kunjungan kerja ke Maluku Pak. Bapak bisa bayangkan bagaimana khususnya dalam menangani masalah korupsi. Dimana temna-teman di Kejari-kejari yang jauh ini dari Ambon harus tersangka dan saksinya ke Ambon. Karenanya kami bersyukur bahwa atas kebaikan hati dari Menteri PU Pera, Kejaksan Tinggi Maluku diberikan hibah untuk akan dibangun semacam mess bagi para Jaksa daerah ketika harus bersidang di Ambon. Saya bahkan minta kepada Menteri PU Pera untuk jangan hanya Maluku tapi juga ... yang lain. Termasuk Pak Benny Karman di kampung kita di NTT sana juga saya rasa perlu. Karena bisa dibayangkan bagaimana ... di Kalambahi, di Alor sana harus sidang di Kupang, tapi juga di Maumere juga harus di Kupang. Belum tentu sekali sidang itu putus. Begitu pun NTB di Kalimantan Tengah dan di tempat lain. Rasanya perlu juga Anggota ... Dan inilah justru dalam kesempatan ini kami sangat berharap dukungan moril paling tidak dari teman-teman atau dari yang terhormat para Anggot Dewan Komisi III. Kami sangat-sangat kekurangan Pak mengenai biaya ini. Saya pikir ini semua harus kita ... bersama. Mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Jambin tapi yang pasti memang kalau dikatakan sedih ya sedih. Kami ingin berbuat banyak tapi penuh dengan keterbatasan-keterbatasan.

Mengenai keraguan-keraguan, apakah nanti dengan pengajuan anggarannya ada *mark-up* dan lain sebagainya, ya silakan di audit sajalah atau dibahas bersama. Tidak ada sedikpun niatan kami untuk membengkakkan anggaran yang ada. Bahkan disetujui pun tetap bersyukur, berterima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Dasco tadi malah

justru usulan pengadaan kontra penginderaan yang kami ajukan jadi lebih rendah. Lebih rendah daripada harga yang lain sehingga diusulkan untuk lebih baik dananya dialihkan untuk tambahan biaya operasional penanganan perkara. Sementara untuk alat yang diperlukan dan memang sangat diperlukan itu ditanggung tahun depan. Ini semua merupakan perhatian kami dan tentunya sekali lagi kami mohon dengan sangat dan mohon dengan hormat dengan 10 jari Komisi III bisa memahami kesulitan kita.

Mengenai yang lain-lain,... dan sebagainya. Pak Junimart memang betul. Itulah yang terjadi. Banyak petugas kita, pejabat kita yang harus bahkan numpang disana-sini. Untuk hidup di kos-kosan, jauh dari keluarga, kadang-kadang tidak ada tempat tidak tersedia. Tapi harus dilakukan karena merupakan komitmen kita. Kita masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil khususnya dilingkungan kejaksaan.

Masalah lain yang juga ingin kami sampaikan mengenai tadi, berkaitan dengan biaya yang diajukan untuk penyelesaian perkara-perkara, perdata, tata urusan negara khususnya super semar. Memang tidak setiap tahun kita menangani kasus yang sama karenanya kalau diajukan secara khusus ini pun karena kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Saya ingin sampaikan bahwa dalam mewakili negara dalam KUHAP perdata ini. Kejaksaan adalah bagian dari pihak-pihak yang berperkara karenanya oleh pengadilan pun dilakukan sama dengan pihak yang lain. Ketika kita mengajukan untuk sita eksklusi, itu pun dilakukan biaya. Dan setelah dihitung-hitung oleh Jamdatun. Saya sempat bertanya apakah betul sebesar itu. Ini perkiraan mereka 2,5 Miliar untuk usaha kita mengembalikan asset negara sebesar 4 Triliun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Ini semua tentunya juga perlu pengertian dan pemahaman dari yang terhormat para Anggota Dewan Komisi III, bahwa apa yang kami ajukan betul-betul rill. Kebutuhan yang memang sangat-sangat mendesak dan sangat diperlukan. Makanya kalau ditanya tentang apakah kejaksaan puas dengan anggaran yang dimiliki sekarang yang penuh keterbatasan biaya. Kami jamin tidak puas. Hanya kita mau bikin apa. Mau bikin apa kata Pak ... Paling kita hanya mengadu ke Komisi III sebagai partner kerja kita. Dengan pihak Menteri Keuangan juga kami sampaikan. Makanya sudah kami dalam laporan juga kami sampaikan ada ... *blocking* itu. Karena kemarin ada supaya pemotongan anggaran kejaksaan yang sudah minim itu bisa di kompensasikan atau dialih fungsikan dengan anggaran lain yang memang masih tersedia. Disamping dulunya juga kami masih mengharapkan tambahan-tambahan untuk sector mata anggaran lain yang memang sangat diperlukan.

Sekali lagi secara teknis mungkin Pak Jomin akan menjawab. Saya hanya ingin menjelaskan tentang apa yang ditanyakan terakhir oleh Junimart Girsang mengenai sikap apa yang kita lakukan untuk adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Jaksa tidak bisa mengajukan PK. Yang putusan itu semata-mata hanya menjawab gugatan uji materi dari seorang istri dari seorang buron perkara koruptor yaitu Saudara Ana Buntar kalau gak salah namanya. Kami punya sikap bahwa ketika kita ajukan PK. Ajuan kita memang bukan KUHAP. Perjalanan perjuangan yang cukup panjang. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan waktu itu Mahkamah Agung memberikan akses dan jalan kepada kita untuk bisa mengajukan PK bagi Jaksa dengan adanya putusan-putusan yang mereka keluarkan yaitu beberapa yurisprudensi. Sementara kami beranggapan bahwa ... adalah juga merupakan sumber hukum.

Jadi kedepan memang tetap kami akan mengajukan PK untuk hal yang memang dirasa perlu untuk PK. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita sepakati bersama

bahwa Jaksa dan pelaksanaan tugasnya adalah mewakili kepentingan korban kejahatan masyarakat dan negara ini. Tentunya kita menginginkan keseimbangan dalam pelayanan pada pencari keadilan. Asal jangan disampaikan pencari keadilan bukan hanya pelaku kejahatan, tapi juga korban kejahatan. Dan Jaksa mewakili kepentingan masyarakat. Tidak lebih dari itu. Kami ... keseimbangan. Dan kembali ketika saya telepon langsung Mahkamah Konstitusi, apa latar belakang sehingga akhirnya melarang Jaksa untuk. Atau mengatakan tidak melarang ya, menyatakan bahwa Jaksa tidak bisa mengancam PK. Konon pertimbangannya adalah untuk melindungi kepentingan si terpidana. Saya kembali sampaikan kepada mereka bahwa pencari keadilan bukan hanya pelaku kejahatan tapi juga korban kejahatan. Dan kalau kita pelajari kembali, kita simak kembali segala pasal yang ada di KUHAP itu hampir seluruhnya memberikan perlindungan kepada kepentingan pelaku kejahatan.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga kami mohon dengan sangat kiranya nanti ketika membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Komisi III tetap bisa mendukung kami untuk Jaksa bisa melakukan PK. Ketika memang sangat diperlukan untuk pengajuan PK demi terciptanya keseimbangan dan terwujudnya keadilan dan kebenaran.

Itu kira-kira Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Nanti yang berkaitan dengan masalah teknis anggaran tadi saya rasa Saudara Jambin lebih menguasai daripada saya karena Saudara Jambin adalah ... tadi yang mengikuti sejak awal perencanaan pembahasan dan dalam pertemuan-pertemuan. Terakhir tentunya trilateral meeting yang diselenggarakan antara Kejaksaan, Kementerian Keuangan dan Bapenas. Sekali lagi saya berharap kiranya dengan pertemuan ini Komisi III sependapat dengan kami.

Mengenai rincian nanti saya rasa mungkin dibahas lebih lanjut juga oleh Pak Jambin. Tapi percayalah bahwa tidak ada sedikitpun niat kejaksaan untuk *me-markup* atau membuat pengajuan yang diluar realitas yang dihadapi.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kalau diijinkan mungkin Jambin bisa memberikan tambahan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

PEMERINTAH/JAKSA AGUNG RI:

Terima kasih.

Mohon ijin Bapak Jaksa Agung.

Pimpinan dan Ibu/Bapak yang terhormat,

Ada beberapa hal, yang pertama tadi terkait dengan anggaran penanganan perkara yang sampai Maret sudah akan habis dan darimana. Ini tadi juga sudah disampaikan juga oleh Bapak Jaksa Agung. Kami dapat tambahan anggaran bagian anggaran bendahara umum pun itu sebesar 628.891.826.000. itu nanti dialokasikan untuk anggaran penanganan perkara Pidum 332.843.000.000, dan untuk anggaran penanganan perkara Piksus 296.048.000.000.

Kemudian mengenai tadi didalam kolom lampiran itu ada penghematan yang 162 diambilkan dari penanganan perkara. Nanti kami usahakan untuk ke Kementerian Keuangan. Mungkin itu tidak diambil dari penanganan perkara tadi. Mudah-mudahan bisa untuk penghematan diambil dari alokasi yang lain.

Kemudian terkait dengan super semar. Ini sebenarnya selain disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung tadi, kami mendapat surat dari Panitera pengadaan negeri Jakarta Selatan melalui suratnya Nomor: W10U3/6/HK.02.163.05/2016, tanggal 09 Mei 2016 yaitu perihal permohonan setor Panjar biaya sita eksekusi. Yang pada pokoknya menyampaikan agar Jaksa pengacra negara pada Kejaksaan Agung membayar Panjar biaya ke kas kepaniteraan negeri Jakarta Selatan sehingga dari surat ini kemudian ada. Kami mohon untuk ditambah APBN-P yang 2,5 Miliar tadi.

Kemudian berikutnya terkait dengan penyampaian DIPA. Rincian tentang kegiatan kita dan pembiayaan kita. Yang tadi oleh Pak Nasir Jamil dan Pak Mukrianto. Mohon ijin Pak, Bapak Jaksa Agung sudah membuat surat Nomor: Bahwa-023/A/CR.2/02/2016, 4 Februari 2016 yang ditujukan kepada DPR perihal: penyampaian DIPA Kejaksaan RI Tahun 2016. Jadi kami sudah sampaikan Pak sejak 4 Februari 2016.

Kemudian berikutnya terkait dengan barang sitaan. Kami sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Menkumham. Dan juga Bapak Jaksa Agung juga sudah membuat surat ke Ketua Mahkamah Agung dan juga ke Kapolri agar Ketua Mahkamah Agung bisa membuat fatwa atau edaran ke para Ketua Pengadilan Negeri agar penanganan barang-barang sitaan atau barang rampasan bisa segera untuk di eksekusi karena ini memang prosesnya lama.

Kemudian juga kami sampaikan kepada Ibu/Bapak bahwa kami juga tidak ada anggaran untuk pemeliharaan atau perawatan terhadap barang sitaan tersebut.

Demikian secara garis besar.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

JAKSA AGUNG RI:

Mohon ijin Bapak Pimpinan.

Sekedar tambahan. Kalau gak salah penanganan barang sitaan dan rampasan. Kami ingin sampaikan bahwa memang ini bagi kami sendiri merupakan *problem*. Ada barang-barang yang tentunya perlu kita pilah-pilah antara barang bukti yang disita dan akhirnya harus dikembalikan kepada si yang berhak. Dan barang bukti yang dirampas untuk negara, baik dimusnahkan maupun dilelang. Ini semuanya masing-masing memiliki problem sendiri-sendiri Pak Pimpinan khususnya untuk barang bukti yang dalam vonisnya dinyatakan dikembalikan kepada negara pun sering kali dan banyak sekali yang tidak diambil yang bersangkutan. Ini juga masalah bagi kami Pak Adies dan akhirnya numpuk. Kami sendiri juga kadang-kadang kewalahan untuk menyimpang barang-barang seperti ini. Nah ini yang kami mintakan kepada Mahkamah Agung antara lain untuk kiranya pengadilan bisa melakukan penetapan bahwa barang-barang itu bisa dinyatakan sebagai temuan untuk kemudian kita musnahkan atau apa pun namanya nanti. Begitupun untuk barang-barang rampasan yang biasanya terdiri dari barang-barang bergerak. Khususnya motor dan mobil. Biasanya barang bukti, ketika misalnya

statusnya barang bukti, motor dan mobil ini sering sekali tidak dilengkapi dengan surat menyurat. Nah kita kemudian kita di vonis untuk dirampas untuk negara yang nantinya akan dilelang biasanya tidak banyak peminat yang mengajukan penawaran, karena apa? karena tidak ada surat-suratnya. Sehingga kita mintakan kepada Kapolri untuk kiranya dengan risalah lelang itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar untuk bukti kepemilikan yang baru untuk barang-barang eks barang rampasan yang dibeli oleh mereka ini.

Terus mengenai, mohon maaf Pak Desmond tadi saya agak terlewat untuk menjelaskan. Mengenai kejaksaan kalah terus, kalah terus. Saya pikir ini perlu harus dipahami bersama. Dan saya berharap dengan sangat untuk tidak langsung memvonis kejaksaan sebagai bodoh atau kurang sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kita harus melihat sisi lain siapa yang mutus itu. Saya pernah katakan disini secara terbuka. Para peradilan sekarang sudah menjadi kendala besar bagi kejaksaan dan kepolisian untuk ... lain ketika menangani satu kasus khususnya kasus korupsi. Dengan berani saya mengatakan bahwa pra peradilan pun sudah merupakan peluang, kesempatan dan lahan yang punya bukti. Begitu pun kasus Surabaya. Mungkin Pak Desmond tahu persis kenapa seperti. Sampai Jaksa Tinggi saya mengatakan saya ingin ketemu hakim yang betul-betul takut pada Tuhan, bukan takut pada atasan. Ini faktanya seperti itu. Jadi sekali lagi mohon kiranya tidak langsung menjustifikasi jaksanya yang bodoh. Kami betul-betul terangkat dalam penanganan kasus secara terukur dengan fakta dan bukti yang ada. Jadi kalau ini pun dikaitkan dengan masalah kinerja saya mohon maaf, mungkin tidak seperti itu. Tapi kami selalu berusaha keras. Untuk apa pun kasus yang kita tangani kita kerjakan dengan penuh personalitas, ... dan proporsionalitas. Itu mungkin Pak Desmonda dan Pak Pimpinan.

Waktu kami kembalikan kepada Pak Pimpinan Rapat Kerja dan penjelasan kami mungkin cukup.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Agung atas penjelasan-penjelasan tadi.

Jadi Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan yang kami hormati,

Sebagaimana tadi saya kemukakan Rapat Kerja pada pagi ini khusus untuk meminta penjelasan Jaksa Agung berkenaan dengan rencana penghematan anggaran di lingkungan Kejaksaan Agung.

Yang berkenaan dengan fungsi pengawasan akan kita agendakan lagi nanti lebih banyak waktunya. Kita dikasih kesempatan oleh Pimpinan Dewan untuk membahas APBN Perubahan ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Kamis sudah harus kita simpulkan. Sesuai dengan mekanisme usulan yang tadi disampaikan oleh Jaksa Agung dengan penjelasan-penjelasan akan kita bawa dalam Rapat Pleno Komisi III untuk dibahas dan didiskusikan dan diputuskan. Tadi kita tidak putus pada saat ini. Pada saat ini kita hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi dari Jaksa Agung. Soal nanti kita setuju, tidak usulan penambahan anggaran tadi sebesar 300-an Miliar itu nanti kita akan bahas lebih detail. Soal item-itemnya kan kita sudah tahu, kita tidak boleh ikut menentukan satuan III. Tetapi kita punya hak untuk mengetahui selambat-lambatnya 1

bulan setelah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh mitra kerja kita. Tentu nanti kita akan mengikuti system dan mekanismenya. Soal yang lain-lain kita nanti akan, soal lelang tadi, sita, segala macam ini kita nanti lebih Pak Jaksa Agung dalam rapat yang akan datang kita akan bahas tuntas soal ini. Banyak masalah yang kita temukan dilapangan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Mungkin kita bersabar dulu Pak Ketua ya. Karena bukan soal kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tetapi, prinsipnya kita dukung tetapi tolong dilaksanakan, dilakukan dengan cermatlah. Supaya jangan ada kasus-kasus seperti Surabaya tadi ya dan kasus-kasus yang lain juga. Karena sekarang mohon maaf Pak Jaksa Agung, ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah kami mendapatkan laporan dan temuan. Kejaksaan itu acap kali meminta hitung kerugian negaranya bukan di BPK tetapi BPKP. Karena BPK tidak mau kasih, mereka minta BPKP. Yang lebih celaka lagi, belum ada kerugian negaranya sudah ditetapkan tersangkanya. Akibatnya gantung ini, kan kasihan pejabat-pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada kasus juga khusus untuk bikin jalan dan bangunan yang diminta untuk menghitung kerugian negaranya itu adalah poli teknik. Jadi memang mungkin negara yang baru ya semacam itu. Kita tidak tahu. Tapi temuan-temuan kita di lapangan semacam ini. Padahal kita tahu, kuasa untuk menghitung menentukan ada tidaknya kerugian negara itu kan hanya BPK, kan begitu Pak. Apakah BPKP bisa? Ya kita ikuti Undang-Undang, mungkin bisa juga. Lalu ada putusan Mahkamah Agung, kan begitu Pak. Lalu setelah BPKP tidak, sekarang minta politeknik. Oh ini kerugian negaranya. Bangunan ini sudah dibikin 10 tahun lalu, wah ini kurang besinya, kan begitu Pak. Lalu kurang lebih kerugian negaranya sekian. Jadi memang mungkin ini inovasi. Kita tidak tahu. Kita nanti akan tanya perdalam dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung yang sudah kita agendakan minggu-minggu depan.

Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian,

Sesuai dengan tertib bersidang di Dewan, kami akan membacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja ini. Jadi dengan satu kesimpulan. Kesimpulan tunggal, Komisi III yang tadi saya sudah jelaskan. "menerima penjelasan Jaksa Agung mengenai pergeseran sumber penghematan anggaran dan efisiensi belanja operasional sebesar Rp95.077.297.700,- dan efisiensi belanja lainnya sebesar Rp67.689.490.900,- ke alokasi anggaran dalam program a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp131.102.298.000,- b. penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp8.637.000.000,- c. penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp23.034.491.000,-. Kedua usulan tambahan anggaran sebesar Rp310.990.157.700,- untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi III yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan Tata Tertib Dewan dan Undang-Undang MD3. Ini kita acuannya Pak. Jadi kalau nanti dipanggil Pak Junimart, soal bagaimana belanjanya kita tidak tahu. Kalau ada teman-teman yang punya niat untuk itu, itu urusan pribadi masing-masing. Jangan kita dibawa-bawa kan begitu Pak, Pak Wasington.

Kalau nanti dipanggil, baik oleh Kejaksaan Agung maupun oleh KPK, ini yang dibawa. Jadi kita tidak usah datang. ... Pak Jaksa Agung. Karena ini politik ini yang dicari, siapa yang memimpin rapat waktu itu. Kan begitu. Lalu ditanya, yang lebih lucu. Ini saya umum. Supaya Bapak nanti besok-besok jadi Ketua rapat disini. Ditanya Pak, waktu itu

Pak Taufiq dari Nasdem tanyanya apa? aku bilang, aku lupa. Lalu ditanya lagi, waktu itu Pak Abu tanya gak? Waktu itu mau tanya, tapi saya tolak. Lalu saya ditanya lagi, kenapa Bapak tolak. Nah coba bayangkan. Besok-besok Bapak/Ibu sekalain jadi rapat disini, mungkin kami sudah bosan atau mungkin politik digusur, itu sudah biasa.

Jadi demikian Bapak/Ibu sekalian, rapat kami tutup disertai ucapan terima kasih kepada Jaksa Agung dan jajarannya. Demikian juga kepada Bapak/Ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.50 WIB)